

**IMPLEMENTASI PASAL 1 ANGKA 5 PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8 TAHUN 2010 DALAM UPAYA  
PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL DI WILAYAH KABUPATEN  
JEMBRANA**

**Oleh**

**Ni Putu Diah Luckyta Maharani, NIM 2114101064**

**Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010, serta hambatan dan upaya pemberdayaan pasar tradisional di wilayah Kabupaten Jembrana berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010. Ada tiga elemen hukum yang dikaji, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* atau sampling tujuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 1 Angka 5 Peraturan Daerah Jembrana 8/2010 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2010 belum maksimal, terlihat dari adanya ketidakkonsistenan dan kurangnya koordinasi antara Diskoperindag, DPRD Komisi II, DPMPTSP, serta Satpol PP Jembrana sebagai struktur hukum di Kabupaten Jembrana. Selain itu, substansi hukum Perda Jembrana Nomor 8/2010 yang belum disesuaikan dengan peraturan pusat. Serta budaya hukum di Kabupaten Jembrana menunjukkan adanya dominasi peraturan pusat yang lebih kuat dibandingkan dengan hukum lokal, belum menunjukkan kepatuhan hukum masyarakat secara sukarela. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi dalam Implementasi Pasal 1 Angka 5 Perda Jembrana Nomor 8/2010 ini karena ketidakselarasan antara Peraturan Daerah Jembrana dengan regulasi yang lebih tinggi, sumber daya manusia yang terbatas di lembaga-lembaga pengawas, serta keterbatasan infrastruktur, permodalan, serta standar kualitas dan kemasan yang tinggi yang diterapkan oleh toko modern juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM. Ketidakpatuhan terhadap Pasal 1 Angka 5 Perda Jembrana telah memperburuk daya saing pasar tradisional dan UMKM. Dampak ini memperburuk kondisi ekonomi lokal dan mengurangi pendapatan UMKM lokal. Oleh karena itu, Diskoperindag berupaya meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha, serta mendesak agar peraturan daerah yang ada disesuaikan dengan perkembangan zaman. Saran untuk peneliti selanjutnya, yaitu membuat studi lanjutan dengan membandingkan kebijakan serupa di daerah lain, dengan karakteristik pasar yang sebanding.

Kata-kata kunci: Pasar Tradisional, Pemberdayaan, Toko Modern, UMKM

**THE IMPLEMENTATION OF ARTICLE 1 NUMBER 5 OF THE REGIONAL  
REGULATION OF JEMBRANA REGENCY NUMBER 8 OF 2010 IN  
EFFORTS TO EMPOWER TRADITIONAL MARKETS IN JEMBRANA  
REGENCY**

**By**

**Ni Putu Diah Luckyta Maharani, NIM 2114101064**

**Department of Law and Citizenship**

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of Article 1 number 5 Jembrana Regency Regulation No. 8/2010, as well as obstacles and efforts to empower traditional markets in the Jembrana Regency area based on Article 1 number 5 of Jembrana Regency Regulation No. 8/2010. There are three legal elements studied, namely legal structure, legal substance, and legal culture. This research uses a qualitative approach with descriptive research type. This type of research is empirical juridical research. The sampling technique used in this research is purposive sampling technique. The result of the research shows that the implementation of Article 1 number 5 of Jembrana Regency Regulation No. 8/2010 has not been maximized, as seen from the inconsistency and lack of coordination between Diskoperindag, Commission II DPRD, DPMPSTP, and Satpol PP Jembrana as the legal structure in Jembrana Regency. In addition, the legal substance of Jembrana Regency Regulation No. 8/2010 has not been adjusted to the central regulations. And the legal culture in Jembrana Regency shows the dominance of central regulations that are stronger than regional regulations, not yet showing voluntary legal compliance of the community. The obstacles faced in the Implementation of Article 1 number 5 of the Jembrana Regency Regulation No. 8/2010 are due to the misalignment between the Jembrana Regency Regional Regulation and higher regulations, limited human resources at supervisory institutions, as well as limited facilities and infrastructure, capital, and high quality and packaging standards applied by modern stores are also an obstacle for MSME actors. Non-compliance with Article 1 number 5 of Jembrana Regency Regulation No. 8/2010 worsens the competitiveness of traditional markets and MSMEs. This has the effect of worsening local economic conditions and reducing the income of local MSMEs. Therefore, Diskoperindag seeks to improve supervision and guidance of business actors, and encourage existing local regulations to be adjusted to the times. A suggestion for future researchers is to make a follow-up study by comparing similar policies in other regions, with comparable market characteristics.*

*Keywords: Empowerment, Modern Store, MSME, Traditional Market*